

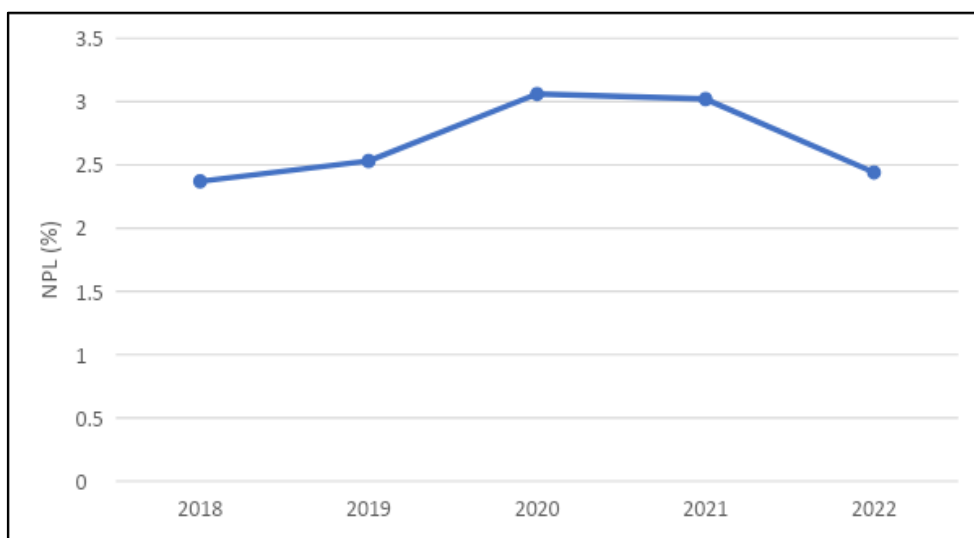
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh penyebaran virus SARS-Cov2 sejak akhir tahun 2019 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di seluruh dunia dan menimbulkan risiko baru terhadap stabilitas keuangan, beberapa negara bahkan sampai mengalami resesi. Penyebarannya Covid-19 di Indonesia juga berdampak signifikan, mulai dari tersendatnya rantai pasok hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Pandemi yang merusak kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat pada akhirnya berdampak juga pada perbankan nasional. Bank Indonesia pada tahun 2021 melaporkan bahwa perbankan di Indonesia mengalami pelemahan kinerja yang disebabkan oleh kontraksi pembiayaan sebesar 2,41% (yoy) pada akhir Desember 2020. Pada kondisi ini, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan menghadapi masalah berat, yaitu risiko penyaluran kredit/pembiayaan, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin/bunga bersih (J.P Morgan dalam Kumaidi dan Padli, 2021: 147).

Gambar 1. 1 Data NPL pada Industri Perbankan Indonesia

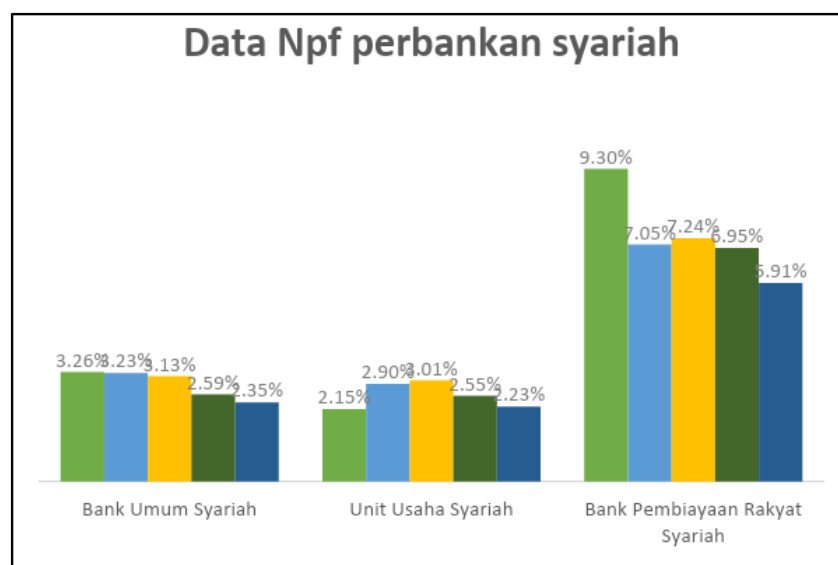


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2022 (data diolah di Excel)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, rasio pembiayaan bermasalah (NPL) pada industri perbankan Indonesia dilihat dari Gambar 1.1 meningkat dari 2,53% pada Desember 2019 menjadi 3,06% pada Desember 2020. Hal ini menyebabkan pihak perbankan menjadi sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Kondisi serupa terjadi pada Perbankan Syariah Indonesia, pada Gambar 1.2 terlihat bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (NPF), hanya Bank Umum Syariah (BUS) saja yang mengalami penurunan.

Keadaan yang menarik terjadi pada BPRS, yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio NPFnya berada pada tingkat yang sangat tinggi, yaitu secara berturut-turut 9,30%, 7,05% dan 7,24%. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari rasio NPF BUS dan UUS pada periode yang sama. Angka tersebut juga berada di atas standar NPF yang di tentukan oleh BI, yaitu 5%. PBI No. 13/1/PBI/2011 telah menetapkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang masih bisa ditolerir sebesar 5%. Bank yang memiliki tingkat NPF di bawah 5% dapat dikatakan berhasil mengendalikan risiko sedangkan bank dengan tingkat NPF melebihi 5% masih belum bisa mengendalikan risiko yang dihadapinya.

Gambar 1. 2 Data NPF Perbankan Syariah Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022 (data diolah di Excel)

Performa pembiayaan yang buruk dari BPRS pada periode 2018 sampai dengan 2020 ternyata mulai membaik di tahun-tahun setelahnya. Nilai NPF BPRS mulai menurun, tahun 2021 dan 2022 NPF BPRS berada di angka 6,95% dan 5,91%. Perbaikan kinerja pada tahun-tahun tersebut juga terjadi pada komponen lain seperti terlihat pada tabel 1.1 bahwa BPRS tumbuh *double digit* pada aset, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD), maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), masing-masing yaitu 14,96% (yoy), 18,33% (yoy) dan 18,12% (yoy). Namun demikian, kondisi NPF yang masih berada di atas batas toleransi yang ditetapkan BI (5%) membuktikan bahwa BPRS perlu menerapkan manajemen risiko pembiayaan agar dapat terus menekan angka pembiayaan yang bermasalah dan semakin meningkatkan kualitas pembiayaannya.

Tabel 1. 1 Indikator Keuangan BPRS di Indonesia

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Aset*	Rp 12.361.734	Rp 13.934.139	Rp 14.943.967	Rp 17.059.911	Rp 20.156.900
DPK*	Rp 8.134.938	Rp 8.731.890	Rp 9.819.043	Rp 11.591.692	Rp 13.446.353
Pembiayaan*	Rp 9.084.467	Rp 9.943.320	Rp 10.681.499	Rp 11.983.801	Rp 14.448.275
CAR	19,33%	17,99%	28,60%	23,79%	24,42%
ROA	1,87%	2,61%	2,01%	1,73%	1,92%
NPF	9,30%	7,05%	7,24%	6,95%	5,91%
FDR	111,67%	113,59%	108,78%	103,38%	107,45%
BOPO	87,66%	84,12%	87,62%	87,63%	86,02%

*Dalam jutaan rupiah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022 (data diolah di Excel)

Kondisi NPF pada tiap-tiap BPRS di Indonesia sebetulnya beragam meskipun secara umum seperti yang diterangkan pada Tabel 1.1. Pihak OJK pada maret 2023 mencatat total BPRS di Indonesia berjumlah 171 BPRS. Terlihat pada tabel 1.2 yang menggambarkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah kantor BPRS terbanyak, dengan 13 kantor yang tersebar di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Provinsi DIY memiliki rasio luas wilayah per BPRS yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS di Provinsi DIY lebih terkonsentrasi secara geografis. Konsentrasi ini mengindikasikan potensi pasar yang lebih padat, meningkatkan

aksesibilitas layanan perbankan syariah bagi penduduk setempat, dan dapat mendukung kesuksesan operasional BPRS di wilayah tersebut. Rasio luas wilayah per BPRS yang lebih rendah, penduduk di wilayah tersebut mungkin memiliki akses yang lebih mudah ke layanan perbankan syariah.

Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah BPRS dan Luas Provinsi

Provinsi	Jumlah	Luas Provinsi (km²)	Rasio Luas Wilayah (km²/BPRS)
Yogyakarta	13	3.186	265,5
Jawa Tengah	26	32.801	1.261,6
Jawa Barat	28	35.578	1.270,6
Jawa Timur	28	47.083	1.681,5

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, (data diolah di Excel)

Total aset yang dimiliki BPRS di DIY per Desember 2022 juga mencapai Rp1,2 triliun. Rasio NPF BPRS di DIY dari data OJK mencapai 9,67% pada tahun 2019 dan 6,64% di tahun 2022, seluruh angka tersebut masih diatas batas toleransi yang ditentukan BI. Bila dibandingkan dengan Provinsi lain, DIY menempati urutan ke-6 NPF BPRS tertinggi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa BPRS di DIY masih mengalami risiko pembiayaan bermasalah. Stabilitas bisnis keuangan syariah di DIY perlu dijaga, salah satu fokus yakni menjaga rasio pembiayaan bermasalah (NPF).

Berikut adalah tabel yang menggambarkan terkait kondisi total aset dan total pembiayaan dan data NPF pada BPRS-BPRS yang ada di DIY dari tahun 2018 s.d 2022.

Tabel 1. 3 Data Total Pembiayaan BPRS di Yogyakarta (dalam ribuan rupiah)

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	TOTAL PEMBIAYAAN				
	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Wilayah Kabupaten Bantul					
BPRS Margirizki Bahagia	Rp 33.253.536	Rp 30.289.115	Rp 25.426.524	Rp 25.280.530	Rp 22.573.170
BPRS Bangun Drajat Warga	Rp 65.174.844	Rp 88.691.960	Rp 94.142.565	Rp 102.027.038	Rp 112.468.123
BPRS Madina Mandiri Sejahtera	Rp 58.398.805	Rp 76.184.009	Rp 70.285.413	Rp 76.494.685	Rp 100.735.678
Wilayah Kabupaten Sleman					
BPRS Mitra Amal Mulia	Rp 40.276.092	Rp 41.723.484	Rp 41.372.659	Rp 47.419.316	Rp 48.498.702
BPRS Danagung Syariah	Rp 26.273.798	Rp 28.379.371	Rp 22.141.286	Rp 25.214.052	Rp 24.525.192
BPRS Harta Isan Karimah Mitra Cahaya Indonesia	Rp 54.748.977	Rp 72.275.483	Rp 77.056.234	Rp 124.505.849	Rp 164.323.114
BPRS Fommes	Rp 25.484.434	Rp 28.561.259	Rp 27.077.280	Rp 29.676.414	Rp 35.563.031
BPRS Cahaya Hidup	Rp 21.414.710	Rp 24.882.630	Rp 24.658.454	Rp 27.615.575	Rp 34.342.805
BPRS Sleman	Unavailable	Unavailable	Unavailable	Unavailable	Unavailable
Wilayah Kota Yogyakarta					
BPRS Dana Hidayatullah	Rp 20.493.358	Rp 18.219.024	Rp 18.219.024	Rp 20.599.376	Rp 34.383.359
BPRS Barokah Dana Sejahtera	Rp 75.575.330	Rp 92.147.792	Rp 97.242.777	Rp 116.682.744	Rp 130.777.001
BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta	Rp 47.497.046	Rp 59.784.515	Rp 63.077.068	Rp 71.311.747	Rp 77.737.842
BPRS Unisia Insan Indonesia	Rp 30.521.139	Rp 41.336.542	Rp 44.674.700	Rp 52.143.981	Rp 72.595.551

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah di Excel)

Tabel 1. 4 Data Total Aset BPRS di Yogyakarta (dalam ribuan rupiah)

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	TOTAL ASET				
	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Wilayah Kabupaten Bantul					
BPRS Margirizki Bahagia	Rp 56.181.806	Rp 58.007.818	Rp 42.061.864	Rp 45.444.611	Rp 38.172.404
BPRS Bangun Drajat Warga	Rp 131.200.366	Rp 146.653.285	Rp 150.352.310	Rp 171.037.969	Rp 184.061.246
BPRS Madina Mandiri Sejahtera	Rp 73.951.251	Rp 85.901.668	Rp 78.177.757	Rp 103.727.822	Rp 145.275.643
Wilayah Kabupaten Sleman					
BPRS Mitra Amal Mulia	Rp 52.020.929	Rp 54.493.905	Rp 57.405.823	Rp 62.004.716	Rp 63.066.980
BPRS Danagung Syariah	Rp 44.565.109	Rp 49.838.855	Rp 38.698.736	Rp 42.305.828	Rp 40.280.212
BPRS Harta Isan Karimah Mitra Cahaya Indonesia	Rp 87.802.565	Rp 159.142.538	Rp 172.095.494	Rp 187.997.411	Rp 225.418.561
BPRS Fommes	Rp 36.126.237	Rp 43.715.271	Rp 43.947.761	Rp 49.453.539	Rp 52.677.907
BPRS Cahaya Hidup	Rp 27.348.717	Rp 33.308.400	Rp 32.782.949	Rp 39.495.931	Rp 50.317.856
BPRS Sleman	Unavailable	Unavailable	Unavailable	Unavailable	Unavailable
Wilayah Kota Yogyakarta					
BPRS Dana Hidayatullah	Rp 28.403.657	Rp 26.006.558	Rp 24.949.685	Rp 29.176.878	Rp 42.917.871
BPRS Barokah Dana Sejahtera	Rp 115.206.430	Rp 136.115.888	Rp 144.469.800	Rp 173.897.132	Rp 184.350.130
BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta	Rp 64.055.926	Rp 72.656.091	Rp 78.936.641	Rp 94.435.047	Rp 97.571.609
BPRS Unisia Insan Indonesia	Rp 50.342.013	Rp 69.054.149	Rp 75.928.681	Rp 83.535.744	Rp 104.855.002

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah di Excel)

Tabel 1. 5 Kondisi NPF BPRS di Yogyakarta

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	NPF			
	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Wilayah Kabupaten Bantul				
BPRS Margirizki Bahagia	13,12	10,57	11,21	9,40
BPRS Bangun Drajat Warga	7,49	6,24	5,97	5,45
BPRS Madina Mandiri Sejahtera	10,5	9,14	5,26	3,53
Wilayah Kabupaten Sleman				
BPRS Mitra Amal Mulia	6,68	1,96	4,44	5,30
BPRS Danagung Syariah	24,62	11,98	9,04	20,38
BPRS Harta Isan Karimah Mitra Cahaya Indonesia	3,21	3,37	1,96	5,02
BPRS Formes	3,45	10,99	5,18	5,56
BPRS Cahaya Hidup	12,41	12,75	13,34	7,02
BPRS Sleman	Unavailable	Unavailable	Unavailable	Unavailable
Wilayah Kota Yogyakarta				
BPRS Dana Hidayatullah	8,2	3,74	2,90	4,43
BPRS Barokah Dana Sejahtera	0,04	3,29	2,47	6,88
BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta	8,5	5,57	5,67	16,19
BPRS Unisia Insan Indonesia	Unavailable	3,78	4,42	2,64

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah di excel)

Satu dari tiga belas kantor BPRS yang berdiri di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah PT. BPRS Bangun Drajat Warga (BPRS BDW). BPRS BDW merupakan BPRS tertua di DIY yang memiliki konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dengan mengembangkan dan mensosialisasikan pola dan sistem perbankan syariah. BPRS BDW juga menjadi pelopor berdirinya lembaga pembiayaan tanpa bunga dan sebagai pusat informasi bagi BPRS yang akan beroperasi di wilayah DIY (Anwar, 2014). BPRS BDW didirikan tahun 1993 hingga kini masih bertahan ditengah persaingan ketat di dunia perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

Total aset dan total pembiayaan BPRS BDW merupakan salah satu yang terbesar di DIY dan nomor 1 (satu) di Kabupaten Bantul. Tabel 1.3 menggambarkan bahwa kondisi total pembiayaan BPRS BDW juga bertumbuh setiap tahunnya, kondisi total pembiayaan yang besar tentunya dapat berimplikasi pada risiko pembiayaan bermasalah yang besar juga. Total aset BPRS BDW juga semakin bertumbuh dan rasio NPF yang semakin membaik disetiap tahunnya mengindikasikan bahwa BPRS BDW dapat menghadapi masalah pembiayaan yang

timbul sehingga semakin tinggi kesempatan perolehan pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan mengakibatkan bertambahnya perolehan total aset.

Pada tabel 1.5, rasio NPF BPRS BDW tahun 2019 tercatat sebesar 7,49%, namun pada tahun 2022 tingkat NPF pada BPRS BDW ternyata semakin membaik, bahkan mendekati 5%. Perbaikan tersebut mengindikasikan bahwa BPRS BDW menjalankan cara-cara yang baik dalam manajemen risikonya. Hal ini sejalan dengan POJK No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjelaskan bahwa manajemen risiko itu berisi serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, monitoring, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPRS. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa BPRS BDW mampu menjalankan manajemen risiko dengan baik, terutama risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan menurut SEOJK No. 10/SEOJK.03/2019 tentang Manajemen Risiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS termasuk risiko akibat BPRS ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (risiko investasi). Masing-masing jenis pembiayaan perbankan syariah memiliki karakteristik risiko berbeda-beda yang perlu diketahui agar dapat melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, monitoring, dan mitigasi risiko untuk masing-masing jenis pembiayaan (Aziz, 2021: 10).

Keberhasilan BPRS BDW dalam menurunkan tingkat NPF dan mengingat posisi BPRS BDW yang merupakan salah satu BPRS dengan aset dan total pembiayaan terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikannya pokok bahasan yang penting. Berdasarkan hal itu, penting bagi penulis untuk mengkaji bagaimana BPRS BDW dalam mengidentifikasi, mengukur, monitoring serta memitigasi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah adanya informasi terkait manajemen risiko pembiayaan yang dapat

digunakan oleh pihak terkait, seperti lembaga keuangan lain ataupun nasabah yang hendak mempercayakan dananya pada BPRS BDW.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan mitigasi pada BPRS Bangun Drajat Warga.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan mitigasi risiko pembiayaan pada BPRS Bangun Drajat Warga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara luas kepada pihak terkait seperti nasabah agar lebih selektif dalam menempatkan dananya di bank. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pihak manajemen risiko BPRS BDW agar mampu mempertahankan kinerja yang baik serta memaksimalkan kinerja yang belum tercapai secara optimal.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi, referensi dan sebagai bahan pembandingan dengan penelitian lain dimasa yang akan datang serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan kesamaan teori yang diperoleh dan penerapannya dalam dunia perbankan terkhusus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.